

Peran Aplikasi SIKS-NG dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Probolinggo

Jannah¹, Deddy Junaedi²

^{1, 2} Program Studi Ekonomi, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid

E-mail: raudatuljannah44191@gmail.com ¹, deddyjuna87@gmail.com ²

Article History:

Received: 09 Juni 2026

Revised: 16 Juni 2026

Accepted: 30 Juni 2026

Keywords: SIKS-NG, Kesejahteraan Masyarakat, Bantuan Sosial, DTKS, DTSN, Sistem Informasi Sosial

Abstract: Kemiskinan masih menjadi permasalahan sosial yang kompleks di Kabupaten Probolinggo, sehingga pemerintah berupaya meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial melalui pemanfaatan teknologi digital, salah satunya dengan penerapan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran aplikasi SIKS-NG dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Probolinggo serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari operator SIKS-NG dan pegawai Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SIKS-NG berperan penting dalam pengelolaan data kesejahteraan sosial, proses verifikasi dan validasi data, serta penentuan penerima bantuan sosial agar lebih terarah dan tepat sasaran. Perubahan sistem dari DTKS menjadi DTSN menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan cakupan dan akurasi data kesejahteraan masyarakat. Namun, implementasi aplikasi ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti gangguan sistem dan jaringan, kurangnya koordinasi antara pusat dan daerah, belum optimalnya operator di tingkat desa, serta ketidaksesuaian data yang menyebabkan inclusion error dan exclusion error. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan penerapan SIKS-NG tidak hanya ditentukan oleh kualitas sistem, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas data, kemampuan sumber daya manusia, serta kejujuran dan ketelitian dalam proses penginputan data agar bantuan sosial dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan mendukung kesejahteraan Masyarakat.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi hampir di seluruh negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Namun, permasalahan ini cenderung lebih dominan terjadi di negara-negara berkembang akibat kondisi pembangunan yang belum sepenuhnya stabil (Junaedi

.....

et al., 2021). Oleh karena itu, Kemiskinan hingga kini masih menjadi persoalan mendasar yang terus dihadapi oleh pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di kabupaten probolinggo. Meskipun pemerintah telah meluncurkan beragam kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, hasil yang dicapai belum sepenuhnya menunjukkan perubahan yang signifikan. Kondisi ini mencerminkan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan menyeluruh, tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, Pendidikan, Kesehatan, serta keterbatasan akses terhadap layanan publik dan lapangan pekerjaan yang layak (Yulfa & Suhita, 2025).

Banyak keluarga di wilayah ini hidup dalam kondisi serba kekurangan dan menggantungkan hidup pada pekerjaan tidak tetap, sehingga menjadikan mereka rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi, seperti kenaikan harga bahan pokok atau berkurangnya peluang kerja. Kondisi tersebut menyebabkan Masyarakat miskin sulit keluar dari lingkaran kemiskinan tanpa adanya intervensi dan dukungan yang memadai dari pemerintah. Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam Upaya menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, dilaksanakan program yang dijalankan tentu mencakup serangkaian aktivitas yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh Masyarakat yang membutuhkan termasuk melalui pendataan penduduk miskin secara menyeluruh dan terstruktur.(Lumowa et al., 2021)

Program ini berfungsi sebagai dasar dalam perumusan kebijakan serta penyaluran berbagai bantuan dan perlindungan sosial agar tepat sasaran. Pendataan tersebut mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang dikelola oleh kementerian sosial republic Indonesia (Salsabila et al., 2025). Landasan hukum tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, yang menegaskan pentingnya penyediaan data yang akurat, mutakhir, dan terintegritas sebagai dasar dalam penanganan permasalahan kemiskinan di Indonesia (Haromin & Andriyansah, 2022).

Meskipun berbagai program bantuan sosial seperti Program keluarga harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan langsung Tunai (BLT) telah berajalan, namun pelaksanaannya masih dihadapkan dengan permasalahan klasik yaitu, ketidaktepatan sasaran penerima bantuan sosial (Pratiwi & Imsar, 2022). Tidak jarang ditemukan kasus Dimana Masyarakat dengan kemampuan ekonomi relatif baik masih menerima bantuan, sedangkan warga yang tergolong miskin yang memang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan. Ketidaktepatan ini menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam proses pendataan, validasi, serta koordinasi antarlevel pemerintahan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah terus berupaya melakukan berbagai inovasi dan pembenahan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada Masyarakat dengan cara yang lebih efisien, modern, dan berbasis teknologi. Hal ini juga dilakukan oleh kementerian sosial, yang senantiasa berkomitmen untuk memperbaiki dan mempercepat proses pelayanan public. Salah satu Langkah nyata yang di tempuh Adalah melalui pengembangan aplikasi Sistem informasi kesejahteraan sosial Next generations (SIKS-NG), sebagai bentuk pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pengelolaan data dan penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran dan transparan (Andriani et al., 2023).

Aplikasi ini merupakan pembaruan dari sistem sebelumnya dan dirancang untuk memperkuat tata Kelola data kesejahteraan sosial agar lebih akurat, transparan, dan terintegritas. Melalui aplikasi SIKS-NG, proses verifikasi, validasi, dan pemuktakhiran DTKS dapat dilakukan secara digital dan berjenjang oleh pemerintah pusat hingga desa. Sistem ini diharapkan mampu mempermudah penyelesaian permasalahan sosial di Masyarakat khususnya yang berkaitan dengan pembaruan data, mengurangi duplikasi penerimaan bantuan, serta meningkatkan efesiensi

.....

penyaluran bantuan sosial.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik dikenal melalui konsep *e-government*, yaitu penerapan teknologi digital oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan. Dalam bidang kesejahteraan sosial, penerapan konsep tersebut diwujudkan melalui penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) sebagai sarana pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penelitian yang dilakukan oleh Lailul Mursyidah dan Arydianti (2024) menjelaskan bahwa aplikasi SIKS-NG dikembangkan untuk mempermudah proses verifikasi, validasi, serta pengajuan bantuan sosial agar penyaluran bantuan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan efisien. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi aplikasi SIKS-NG dipengaruhi oleh kemampuan operator dalam menyesuaikan diri dengan sistem, tercapainya tujuan program, serta adanya koordinasi dan kerja sama antar pihak yang terlibat dalam pengelolaan data kesejahteraan sosial.

Namun, penerapan aplikasi SIKS-NG di lapangan masih menghadapi sejumlah hambatan. Hasil penelitian Mursyidah dan Arydianti (2024) di Desa Keper Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa pelaksanaan aplikasi tersebut belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan berbagai kendala, seperti kurangnya pelatihan bagi operator, adanya gangguan pada pembaruan sistem, serta ketidaksesuaian data penerima bantuan antara data usulan dari desa dengan data yang ditetapkan pemerintah pusat. Selain itu, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai mekanisme pengusulan bantuan sosial melalui aplikasi SIKS-NG kepada masyarakat masih belum maksimal, sehingga keterlibatan masyarakat dalam proses pengajuan dan pembaruan data penerima bantuan juga masih terbatas.

Secara menyeluruh, penerapan aplikasi SIKS-NG memberikan dampak positif terhadap berbagai pihak, pemerintah tidak hanya berfokus pada program inovatif, tetapi juga memberikan dukungan penuh kepada para pelaksana dan operator di lapangan. Bentuk dukungan tersebut datang dari berbagai pihak, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah (kabupaten). Beragam Upaya telah dilakukan untuk mendukung penerapan program SIKS-NG, diantaranya melalui kegiatan bimbingan teknis di berbagai kecamatan guna meningkatkan pemahaman operator dalam proses penginputan data ke aplikasi SIKS-NG. Selain itu pemerintah juga menyediakan fasilitas teknologi untuk menunjang kinerja para operator. Dengan adanya dukungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa komitmen dan support dari pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan program SIKS-NG. Kepedulian dan peran aktif dari pihak pimpinan turut memberikan motivasi serta dorongan semangat bagi para pelaksana di lapangan dalam mewujudkan tujuan program secara optimal.

Namun, keberhasilan tersebut belum sepenuhnya tercermin di tingkat lokal. Di kabupaten Probolinggo masih, menghadapi tingkat kemiskinan sebesar 16,45 % pada tahun 2024 (BPS, 2024), Dimana Sebagian besar penduduk miskin bekerja di sektor informal dan bergantung pada program bantuan sosial pemerintah (Sanimanto, 2024). Dalam hal ini, penerapan SIKS-NG masih menghadapi berbagai kendala, seperti terhapusnya data Masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan justru terhapus dari sistem, keterlambatan pembaruan data yang disebabkan oleh gangguan sistem error, serta kurangnya sinkronisasi antara data di Tingkat desa, kabupaten, dan pusat.

Selain itu, juga terdapat pada keterbatasan sumber daya manusia yang masih belum terbentuknya operator di Tingkat desa, dan lemahnya koordinasi antara instansi juga berdampak negative terhadap kualitas data penerima bantuan. Akibat kombinasi faktor-faktor tersebut, masih menjadi ketidaksesuaian antara data yang dicatat dalam sistem dengan kondisi sosial ekonomi Masyarakat di lapangan. Keberhasilan penerapan SIKS-NG tidak hanya ditentukan oleh

kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kapasitas Masyarakat dalam proses pembaruan data. Faktor-faktor sosial dan kelembagaan tersebut sangat memengaruhi bagaimana sistem digital ini dijalankan dalam konteks lokal yang memiliki dinamika tersendiri. Oleh karena itu efektifitas SIKS-NG menjadi krusial untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan berkeadilan.

Dengan demikian masih terdapat celah penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut yakni, mengenai bagaimana peran aplikasi SIKS-NG dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di kabupaten probolinggo, mengidentifikasi faktor-faktor kendala dalam penggunaan aplikasi SIKS-NG, khususnya yang berkaitan dengan akurasi dan pemutakhiran data. Kondisi tersebut pada akhirnya berpengaruh terhadap ketepatan penyaluran bantuan dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana sistem SIKS-NG diterapkan dilapangan. Penelitian ini tidak hanya meninjau aspek teknis dalam penggunaan aplikasi, tetapi juga menelaah dimensi sosial dan melibatkan sumber daya yang turut memengaruhi efektifitas sistem tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi secara lebih rinci bagaimana pemerintah daerah khususnya di kabupaten probolinggo Bersama dengan aktor-aktor pelaksana dilapangan, menjalankan kebijakan digitalisasi data kesejahteraan sosial serta menyesuaikannya dengan kondisi sosial Masyarakat setempat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Probolinggo serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya.

Berisi deskripsi tentang latar belakang permasalahan yang diselesaikan, isu-isu yang terkait dengan masalah yg diselesaikan, ulasan penelitan yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain yg relevan dengan penelitian yang dilakukan, serta didukung dengan *literature review* yang relevan. Referensi menggunakan *APA Style 6 th edition* dan penelitian ini menggunakan bodynote. (Times New Roman, size 12, Spacing: before 0 pt; after 0 pt, Line spacing: 1)

LANDASAN TEORI

Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan suatu rangkaian komponen yang saling terintegrasi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan data agar dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi proses pengambilan Keputusan (Oktaviyana et al., 2025). Sistem Informasi kesejahteraan sosial Next generation (SIKS-NG) Adalah sistem informasi yang dirancang untuk mengelola dan memperbarui data DTKS dengan teknologi modern (Mulyana et al., 2024).

Sistem informasi pada dasarnya dibangun oleh empat unsur yaitu perangkat lunak, perangkat keras, infrastruktur atau sarana pendukung, serta sumber daya manusia yang memiliki keterampilan. Keempat komponen tersebut saling terintegrasi dan berfungsi secara bersama-sama untuk mengolah data sehingga dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi penggunaanya (Salsabila et al., 2025). Komponen tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kemampuan sumber daya manusia dalam mengolah dan memanfaatkan sistem tersebut secara optimal.

Dalam konteks kebijakan publik, sistem informasi membantu pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, serta transparansi layanan, termasuk dalam pengelolaan data kesejahteraan sosial (Yusman et al., 2024). Pemanfaatan sistem informasi memungkinkan pemerintah untuk mengelola data secara lebih sistematis sehingga dapat mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan secara lebih efektif. Sistem informasi merupakan kumpulan elemen yang saling berhubungan untuk menghasilkan informasi yang

bermanfaat bagi penggunaanya (Al Fatta, 2007).

Sistem informasi juga berperan dalam mendukung proses operasional, manajerial, hingga pengambilan keputusan. Dalam perspektif administrasi publik, penggunaan sistem informasi merupakan bagian dari implementasi e-government yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Sutabri, 2012). Dengan demikian, sistem informasi memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan berbasis data, khususnya dalam bidang kesejahteraan sosial.

Model kesuksesan sistem informasi yang dikemukakan oleh William H. DeLone dan Ephraim R. McLean pada tahun 1992 mendapat perhatian luas dari para peneliti, karena dinilai sederhana namun memiliki tingkat validitas yang baik. Model ini kemudian diperbarui pada tahun 2003 untuk menyempurnakan indikator keberhasilan sistem informasi agar lebih relevan dengan perkembangan teknologi. Keberhasilan suatu sistem informasi dapat diukur melalui enam indikator utama, yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, tingkat penggunaan, kepuasan pengguna, dampak terhadap individu, serta dampak terhadap organisasi (ALIM, 2024).

Kualitas sistem ini berkaitan dengan kinerja dan karakteristik teknis dari sistem informasi yang digunakan. Kualitas informasi mengacu pada mutu informasi yang dihasilkan oleh sistem. Tingkat penggunaan menunjukkan sejauh mana sistem dimanfaatkan oleh pengguna, sedangkan kepuasan pengguna mencerminkan respon atau penilaian pengguna terhadap sistem tersebut. Selanjutnya, dampak individu menggambarkan pengaruh sistem terhadap kinerja pengguna, dan dampak organisasi menunjukkan kontribusi sistem terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan. Model ini sangat relevan dengan penelitian ini karena mampu mengukur keberhasilan implementasi sistem informasi secara komprehensif, baik dari aspek teknis maupun aspek pengguna. Oleh karena itu, model ini digunakan sebagai landasan teori dalam menganalisis peran aplikasi SIKS-NG.

Dalam hal ini Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) hadir sebagai salah satu bentuk penerapan sistem informasi di bidang kesejahteraan sosial. Aplikasi ini, merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial untuk mengelola, memperbarui, dan memadukan data kesejahteraan sosial secara terpadu, sehingga dapat mendukung penyaluran program bantuan sosial yang lebih akurat dan tepat sasaran (Sekar Arum Puspita Ramadhani, 2025). Kementerian Sosial Republik Indonesia memanfaatkan Aplikasi ini sebagai sarana untuk menyempurnakan data yang telah ada sekaligus mengusulkan pembaruan Basis Data Terpadu (BDT). Dalam penerapannya, Operator SIKS-NG telah tersedia hampir di setiap wilayah karena perannya sangat dibutuhkan oleh Kementerian Sosial dalam memasukkan serta memperbarui data kemiskinan di desa dan kelurahan (Farhatun, 2024).

Dengan menekankan akurasi dan ketepatan data, SIKS-NG dirancang untuk mempermudah pihak terkait dalam menghimpun dan memperbarui informasi di lapangan, sehingga pelaksanaan program bantuan dapat direncanakan dan disalurkan dengan lebih tepat sasaran (Diskominfo Ogan Ili, 2023). Aplikasi juga berfungsi untuk menginput dan memperbarui data kemiskinan di setiap desa dan kelurahan. Dengan demikian, aplikasi ini berperan penting dalam meningkatkan kualitas data sosial yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, aplikasi SIKS-NG dirancang sebagai alat yang efisien dan terpadu dalam mendukung Tingkat keberhasilan kebijakan kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan Masyarakat

Sejahtera dalam KBBI diartikan sebagai tenang, damai, makmur, selamat, serta terhindar dari berbagai gangguan. Kesejahteraan merupakan sebuah keadaan yang meliputi sejahtera, aman, selamat, dan damai. Sejahtera berasal dari kata Sansekerta catera, yang berarti perlindungan atau naungan. Dalam konteks kesejahteraan, catera merujuk pada keadaan seseorang yang hidup dalam

.....

kemakmuran, yaitu seseorang yang menikmati apa yang mereka miliki. ketenangan dan rasa aman, baik secara fisik maupun mental, karena terbebas dari rasa takut, kemiskinan, kecemasan, dan ketidaktahuan (Almahmudi, 2019).

Kondisi sejahtera ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, serta akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai. Selain itu, kesejahteraan juga tercermin dari terciptanya kehidupan sosial yang adil, aman, tertib, dan harmonis. Berbagai pandangan ahli dan lembaga menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak dapat diukur semata-mata dari pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga mencakup aspek non-material, seperti rasa aman, keadilan sosial, kualitas hubungan sosial, serta tingkat kebahagiaan dan kepuasan hidup masyarakat secara keseluruhan (Fajar et al., 2025).

Kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi di mana kebutuhan dasar manusia terpenuhi serta individu memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri dan berfungsi secara optimal dalam Masyarakat (Fentiani et al., 2025). dalam hal ini, kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial yang lebih luas. Kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan peningkatan kualitas hidup yang meliputi pendapatan, pendidikan, kesehatan, serta kesempatan kerja (Rahmawati & Bayangkara, 2024). Dengan demikian, kesejahteraan dapat dipahami sebagai kondisi multidimensional yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia.

Dalam pandangan Hak Asasi Manusia (HAM), kesejahteraan merupakan hak dasar setiap individu, baik laki-laki, perempuan, remaja, maupun anak-anak, untuk menikmati taraf hidup yang layak. Hal ini mencakup akses terhadap layanan kesehatan, pangan, air bersih, tempat tinggal yang memadai, serta jaminan sosial. Apabila negara atau pihak yang berwenang gagal memenuhi hak-hak tersebut, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), kesejahteraan merupakan hak dasar setiap individu untuk memperoleh taraf hidup yang layak, termasuk akses terhadap pangan, layanan kesehatan, air bersih, tempat tinggal, serta jaminan sosial (Jayanti et al., 2024). Pemenuhan hak-hak tersebut menjadi tanggung jawab negara sebagai bagian dari upaya menjamin kesejahteraan seluruh warga negara. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial, pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga mampu berperan secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat (*UU Nomor 11 Tahun 2009*, n.d.)

Sementara itu, perlindungan sosial diartikan sebagai serangkaian upaya yang disusun secara terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat, dengan tujuan menyediakan layanan sosial yang menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar seluruh penduduk (Sutiyo & Fadhilah, 2024). Dalam konteks kependudukan, perlindungan sosial ini mencakup berbagai kegiatan seperti rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan Masyarakat (Suharto, 2015). Dengan demikian, kesejahteraan tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara melalui kebijakan publik yang terarah dan berkelanjutan.

Dalam menentukan tercapai tidaknya pembangunan di suatu wilayah, ada beberapa indikator yang dapat mengukur kesejahteraan rakyat dan berfungsi sebagai landasan ukuran keberhasilan (Qoiriyah et al., 2024). Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu wilayah (Ningrum et al., 2024). Konsep ini mencerminkan hasil dari berbagai aspek pembangunan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Dalam pendekatan pembangunan sosial, kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama yang ingin dicapai melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena

.....

itu, kebijakan publik diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat mengakses sumber daya dan layanan yang dibutuhkan. Tingkat pendapatan, pendidikan, akses kelayakan kesehatan, kesempatan kerja, kondisi tempat tinggal, dan tingkat kemiskinan. Dalam hal ini, dapat digunakan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat untuk mengukur sejauh mana suatu masyarakat telah mencapai taraf kehidupan yang sejahtera. terutama jika dibandingkan dengan standar kebutuhan hidup yang layak secara sosial dan ekonomi (Sastrawan et al., 2024).

Konsep ini sejalan dengan pendekatan pembangunan sosial, yang menempatkan masyarakat sebagai fokus utama keberhasilan pembangunan. Pendekatan ini menggunakan peningkatan kualitas hidup sebagai ukuran penting untuk mengevaluasi seberapa efektif kebijakan publik. Oleh Karena itu, program bantuan sosial dan sistem pengelolaan data seperti SIKS-NG membantu memberikan bantuan yang lebih tepat sasaran kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, keduanya memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, program bantuan sosial memiliki peran yang sangat penting, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Namun, efektivitas program tersebut sangat bergantung pada akurasi data penerima bantuan. Keberadaan sistem informasi seperti aplikasi SIKS-NG menjadi sangat penting dalam mendukung efektivitas program tersebut, terutama dalam memastikan ketepatan data penerima bantuan sosial. Dengan data yang akurat dan terintegrasi, program bantuan dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan yang dibuat, tetapi juga oleh kualitas sistem informasi yang digunakan dalam mendukung penerapan kebijakan tersebut. Keberadaan aplikasi ini menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan akurasi data dan efektivitas program bantuan sosial, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peran Aplikasi SIKS-NG Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Sistem informasi merupakan serangkaian komponen yang saling terhubung untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan data sehingga dapat menjadi informasi yang berguna dalam proses pengambilan Keputusan (Sari et al., 2024). Dalam konteks penyelenggaraan layanan publik, sistem informasi berperan penting dalam meningkatkan akurasi, efisiensi, dan transparansi, termasuk dalam pengelolaan data kesejahteraan sosial. Para ahli juga menegaskan bahwa sistem informasi adalah kumpulan elemen yang bekerja secara terintegrasi untuk menghasilkan informasi yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan operasional hingga pengambilan keputusan manajerial (Oktaviyana et al., 2025).

Salah satu model yang banyak digunakan untuk mengukur keberhasilan sistem informasi adalah model yang dikembangkan oleh William H. DeLone dan Ephraim R. McLean. Model ini menjelaskan bahwa keberhasilan sistem informasi dapat diukur melalui beberapa indikator utama, yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, penggunaan sistem, kepuasan pengguna, dampak individu, dan dampak organisasi.

Dalam bidang kesejahteraan sosial penerapan sistem diwujudkan melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Aplikasi ini dikembangkan oleh Kementerian Sosial sebagai platform digital untuk mengelola dan memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (Windari & Rodiyah, 2024). Aplikasi ini digunakan oleh pemerintah desa, kelurahan, hingga kabupaten/kota untuk menginput, memperbarui, dan memverifikasi data masyarakat miskin. Dengan desain yang terpadu, SIKS-NG memungkinkan proses pendataan menjadi lebih efisien, akurat, dan sistematis sehingga mendukung perencanaan program bantuan sosial yang benar-benar sesuai dengan kondisi riil masyarakat di tingkat lokal.

Keterkaitan antara Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dan

kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari peran sistem informasi sebagai instrumen pendukung utama dalam penyelenggaraan kebijakan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan program bantuan sosial, tetapi juga oleh ketepatan pemerintah dalam mengenali kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut. Dalam konteks ini, aplikasi ini berfungsi sebagai sarana strategis untuk menghimpun, mengelola, dan memperbarui data kesejahteraan sosial secara terintegrasi, sehingga pemerintah memiliki dasar informasi yang lebih akurat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan bantuan sosial.

Pengelolaan data kesejahteraan sosial yang dilakukan melalui aplikasi ini berpengaruh langsung terhadap upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Ketika data yang digunakan dalam perencanaan program bantuan bersifat mutakhir dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, maka bantuan sosial yang disalurkan akan lebih tepat sasaran dan mampu menjangkau kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Sebaliknya, apabila sistem informasi tidak berjalan secara optimal, maka potensi terjadinya kesalahan pendataan akan meningkat, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tujuan kesejahteraan Masyarakat.

kesejahteraan masyarakat sebagai indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial, seperti rasa aman, keadilan sosial, dan kualitas hidup secara keseluruhan (Darma, 2024). Oleh karena itu, keberhasilan program bantuan sosial sangat bergantung pada kualitas sistem informasi yang digunakan dalam proses pendataan dan penyalurannya. Aplikasi ini, sebagai sistem informasi berbasis digital, berperan dalam menjembatani kebutuhan pemerintah akan data yang akurat dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan. Melalui mekanisme pendataan, verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data secara berkala, sistem ini diharapkan mampu mendukung penyaluran bantuan sosial yang lebih adil dan merata.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa SIKS-NG dan kesejahteraan masyarakat memiliki hubungan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. SIKS-NG menjadi alat penting dalam mendukung kebijakan kesejahteraan sosial, sementara kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan akhir dari pemanfaatan sistem tersebut. Optimalisasi peran SIKS-NG dalam pengelolaan data kesejahteraan sosial diharapkan dapat mendorong terciptanya penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, sehingga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Berisi landasan teori yang dipakai pada penelitian ini. Pada bagian ini disarankan memuat banyak pendapat ahli dan berbagai referensi untuk memperkuat penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana peran aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Probolinggo. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak hanya berfokus pada angka atau data statistik, tetapi lebih menekankan pada pemahaman terhadap proses, pengalaman, serta kondisi nyata yang terjadi di lapangan terkait penggunaan aplikasi SIKS-NG. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi secara lebih rinci mengenai proses pendataan, verifikasi, validasi data, hingga berbagai kendala yang dihadapi oleh petugas dalam pelaksanaan sistem tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian studi kasus dipilih karena penelitian ini berfokus pada satu objek tertentu, yaitu penerapan aplikasi SIKS-NG di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo. Dengan menggunakan studi kasus, peneliti dapat mengkaji fenomena secara lebih mendalam dan kontekstual sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo karena instansi tersebut memiliki peran

.....

penting dalam proses pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), verifikasi data, serta penyaluran bantuan sosial kepada Masyarakat.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan aplikasi SIKS-NG, seperti operator dan pegawai Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo. Melalui wawancara, peneliti memperoleh informasi mengenai proses penggunaan aplikasi, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi secara langsung terhadap proses penggunaan aplikasi SIKS-NG di lapangan. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi nyata terkait proses pendataan, verifikasi, dan pemutakhiran data penerima bantuan sosial. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui pengumpulan arsip, laporan, foto kegiatan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan aplikasi SIKS-NG.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model analisis data Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilih dan menyederhanakan data yang dianggap relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Tahap terakhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan berdasarkan hasil temuan yang diperoleh selama penelitian berlangsung.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga informasi yang diperoleh dapat diuji kebenarannya. Selain itu, peneliti juga membandingkan informasi dari beberapa informan yang berbeda agar data yang dihasilkan lebih akurat dan dapat dipercaya. Dengan penggunaan triangulasi, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Peran Aplikasi SIKS-NG dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) merupakan sistem informasi berbasis digital yang digunakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo dalam pengelolaan data kesejahteraan masyarakat. Sistem ini berfungsi sebagai sarana pendataan, verifikasi, validasi, dan penentuan sasaran penerima bantuan sosial. Dalam implementasinya, SIKS-NG tidak hanya digunakan sebagai alat administrasi, tetapi juga menjadi dasar dalam proses pengambilan kebijakan sosial, khususnya terkait penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan operator SIKS-NG dan pegawai Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, diketahui bahwa aplikasi ini mulai digunakan sejak tahun 2017 dengan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Seiring perkembangan kebijakan pemerintah, pada tahun 2025 sistem tersebut mengalami perubahan menjadi Data Tunggal Sosial Nasional (DTSN). Perubahan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan integrasi dan akurasi data kesejahteraan masyarakat secara nasional.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan aplikasi SIKS-NG melibatkan beberapa pihak yang memiliki fungsi berbeda, yaitu kepala dinas, verifikasi, pengisi data, dan admin. Kepala dinas berperan sebagai penanggung jawab utama dalam pengawasan sistem, verifikasi bertugas melakukan verifikasi dan validasi data, pengisi data bertanggung jawab terhadap penginputan dan pembaruan data masyarakat, sedangkan admin berfungsi mengelola aspek teknis sistem.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa data dalam DTSN berasal dari berbagai

sumber, seperti data usulan masyarakat di tingkat desa (Data C), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), serta DTKS. Data tersebut diverifikasi secara bertahap sebelum ditetapkan menjadi data nasional yang digunakan dalam program bantuan sosial. Dengan demikian, aplikasi SIKS-NG berfungsi sebagai penghubung antara data lapangan dengan kebijakan pemerintah dalam bidang kesejahteraan sosial. Selain itu, aplikasi ini menerapkan sistem desil dalam pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan. Pengelompokan dilakukan mulai dari desil 1 hingga desil 10. Masyarakat pada desil bawah, khususnya desil 1 sampai desil 3, diprioritaskan sebagai penerima bantuan sosial karena dikategorikan sebagai kelompok paling rentan secara ekonomi. Sementara itu, masyarakat pada desil menengah umumnya memperoleh bantuan dalam bentuk jaminan kesehatan, sedangkan desil atas dikategorikan sebagai kelompok mampu.

Berdasarkan temuan penelitian, penggunaan sistem desil membantu pemerintah dalam menentukan prioritas penerima bantuan secara lebih objektif dan terarah. Penentuan desil dilakukan berdasarkan indikator sosial ekonomi, seperti penghasilan, kondisi rumah, kepemilikan aset, dan jumlah tanggungan keluarga. Dengan demikian, proses penentuan penerima bantuan tidak hanya didasarkan pada penilaian subjektif, tetapi menggunakan data yang diolah secara sistematis melalui aplikasi SIKS-NG. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa keberadaan aplikasi SIKS-NG memberikan perubahan dalam pengelolaan data kesejahteraan sosial. Sebelum adanya sistem tersebut, pengelolaan data masih dilakukan secara manual dan tersebar di berbagai dokumen, sehingga menyulitkan proses pencarian dan pembaruan data. Setelah penerapan SIKS-NG, data menjadi lebih terpusat, terstruktur, dan mudah diakses oleh pihak terkait.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas aplikasi SIKS-NG masih sangat dipengaruhi oleh kualitas dan pembaruan data. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dinamis menyebabkan data perlu dimutakhirkan secara berkala agar tetap sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Oleh karena itu, keberhasilan aplikasi ini tidak hanya ditentukan oleh sistem teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kemampuan pengelola dalam menjaga akurasi dan keberlanjutan pembaruan data.

Kendala dalam Penggunaan Aplikasi SIKS-NG dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi SIKS-NG di Kabupaten Probolinggo masih menghadapi beberapa kendala, baik dari aspek teknis maupun kualitas data.

1) Kendala Teknis dan Koordinasi

Kendala utama yang ditemukan berkaitan dengan gangguan jaringan dan error sistem yang menyebabkan proses pembaruan data maupun pengusulan bantuan sosial menjadi terhambat. Operator tidak dapat melakukan input data ketika sistem mengalami gangguan sehingga proses pelayanan harus menunggu hingga sistem kembali normal. Selain itu, pembaruan fitur aplikasi yang dilakukan oleh pusat sering kali tidak disertai sosialisasi terlebih dahulu kepada operator daerah. Kondisi ini menyebabkan operator harus beradaptasi secara mandiri terhadap perubahan sistem yang terjadi. Situasi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi dan dukungan teknis antara pusat dan daerah belum berjalan optimal. Kendala lainnya adalah belum terbentuknya operator SIKS-NG di seluruh tingkat desa di Kabupaten Probolinggo. Hal ini menyebabkan proses koordinasi dan penanganan pengaduan masyarakat menjadi kurang efektif. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Dinas Sosial melakukan koordinasi dengan pendamping sosial dan pemerintah desa

serta melakukan pengecekan langsung ke lapangan.

2) **Permasalahan Akurasi Data**

Penelitian juga menemukan adanya permasalahan inclusion error dan exclusion error dalam sistem. Inclusion error terjadi ketika masyarakat yang tergolong mampu masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial, sedangkan exclusion error terjadi ketika masyarakat yang seharusnya menerima bantuan justru tidak masuk dalam data penerima. Permasalahan tersebut terjadi karena data yang digunakan belum sepenuhnya diperbarui sesuai kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terus berubah. Meskipun data telah terintegrasi dari berbagai sumber seperti Regsosek, Data C, DTKS, dan DTSN, namun tanpa pemutakhiran secara berkala, data berpotensi tidak lagi relevan dengan kondisi nyata di lapangan. Akibatnya, bantuan sosial yang disalurkan dapat mengalami keterlambatan maupun ketidaktepatan sasaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas data menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas program kesejahteraan sosial berbasis sistem informasi.

3) **Upaya dalam Mengatasi Kendala**

Berdasarkan hasil penelitian, operator SIKS-NG melakukan beberapa upaya untuk mengatasi kendala yang terjadi. Ketika sistem mengalami gangguan, operator tetap menyiapkan data yang akan diperbarui agar proses input dapat dilakukan setelah sistem kembali normal. Operator juga melakukan pembelajaran mandiri dan saling berkoordinasi dengan operator lain ketika terjadi pembaruan fitur aplikasi. Selain itu, koordinasi dengan pendamping sosial dan pemerintah desa dilakukan untuk membantu proses pengecekan data dan penanganan pengaduan masyarakat. Upaya tersebut menunjukkan bahwa implementasi aplikasi SIKS-NG tidak hanya bergantung pada sistem digital, tetapi juga pada kerja sama antar pelaksana di lapangan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktor kejujuran dan ketelitian dalam penginputan data menjadi aspek penting dalam keberhasilan penggunaan aplikasi SIKS-NG. Data yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat akan berdampak pada ketidaktepatan sasaran bantuan sosial. Oleh karena itu, pemutakhiran data secara berkala menjadi kebutuhan utama agar sistem dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat dan relevan.

B. Pembahasan

Analisis Peran Aplikasi SIKS-NG dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian, aplikasi SIKS-NG memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan data kesejahteraan sosial di Kabupaten Probolinggo. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai instrumen pendukung kebijakan publik dalam menentukan sasaran penerima bantuan sosial secara lebih objektif dan terarah. Penggunaan DTSN sebagai pengembangan dari DTKS menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan integrasi data sosial secara nasional. Integrasi tersebut memungkinkan proses verifikasi dan validasi data dilakukan secara lebih sistematis sehingga pemerintah memiliki basis data yang lebih kuat dalam menentukan kebijakan sosial.

Dalam konteks sistem informasi, keberadaan SIKS-NG dapat dianalisis menggunakan model keberhasilan sistem informasi DeLone dan McLean (2003), yang terdiri atas kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih.

1. Kualitas Sistem (System Quality)

Aplikasi SIKS-NG menunjukkan perkembangan yang cukup baik dari sisi kualitas sistem. Sistem ini mampu mengintegrasikan data secara terpusat dan mempermudah pengelolaan data dibandingkan metode manual sebelumnya. Perubahan dari DTKS menjadi DTSN juga menunjukkan adanya pengembangan sistem agar lebih relevan dengan kebutuhan pengelolaan data sosial secara nasional.

2. **Kualitas Informasi (Information Quality)**

SIKS-NG menghasilkan informasi yang digunakan sebagai dasar penentuan penerima bantuan sosial. Penggunaan sistem desil menunjukkan bahwa data tidak hanya dikumpulkan, tetapi juga diolah untuk menentukan prioritas penerima bantuan berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, kualitas informasi masih sangat dipengaruhi oleh ketepatan dan pembaruan data di lapangan.

3. **Kualitas Layanan (Service Quality)**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan dalam implementasi sistem masih menghadapi kendala, terutama terkait komunikasi antara pusat dan daerah. Pembaruan sistem tanpa sosialisasi yang memadai menyebabkan operator harus beradaptasi secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan layanan dan komunikasi teknis masih perlu ditingkatkan.

4. **Penggunaan dan Kepuasan Pengguna (Use and User Satisfaction)**

Aplikasi SIKS-NG dinilai membantu proses pengelolaan data kesejahteraan sosial karena data menjadi lebih terpusat dan mudah diakses. Meskipun demikian, pengguna masih menghadapi kendala teknis dan penyesuaian terhadap perkembangan sistem yang terus berubah.

5. **Manfaat Bersih (Net Benefits)**

Keberadaan aplikasi SIKS-NG memberikan manfaat dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan data dan penyaluran bantuan sosial. Sistem ini membantu pemerintah dalam menentukan sasaran penerima bantuan secara lebih terarah sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat.

Analisis Kendala dalam Penggunaan Aplikasi SIKS-NG dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kendala penggunaan SIKS-NG tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga menyangkut aspek sumber daya manusia dan kualitas data. Gangguan jaringan dan error sistem menunjukkan bahwa kualitas sistem masih memerlukan peningkatan agar lebih stabil dalam mendukung pekerjaan operator. Selain itu, kurangnya sosialisasi terkait pembaruan fitur menunjukkan bahwa kualitas layanan belum sepenuhnya optimal.

Permasalahan inclusion error dan exclusion error juga menunjukkan bahwa kualitas informasi dalam sistem masih menghadapi tantangan. Data yang tidak diperbarui secara berkala menyebabkan informasi yang dihasilkan tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat terkini. Dalam konteks kebijakan publik, kondisi ini dapat memengaruhi ketepatan sasaran bantuan sosial.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan sistem informasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dan koordinasi antar lembaga. Belum optimalnya operator di tingkat desa menyebabkan proses pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat menjadi kurang efektif. Selain itu, faktor kejujuran dan ketelitian dalam penginputan data menjadi aspek penting dalam menjaga kualitas informasi. Data yang tidak akurat akan memengaruhi keseluruhan proses kebijakan karena sistem menggunakan

data tersebut sebagai dasar dalam penentuan penerima bantuan sosial.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Lailul Mursyidah dan Arydianti (2024) yang menunjukkan bahwa aplikasi SIKS-NG telah membantu pengelolaan data kesejahteraan sosial menjadi lebih terstruktur, namun masih menghadapi kendala teknis, keterbatasan sumber daya manusia, dan permasalahan akurasi data. Perbedaan penelitian ini terletak pada pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian ini menggunakan model DeLone dan McLean sehingga pembahasan tidak hanya berfokus pada efektivitas implementasi, tetapi juga menelaah hubungan antara kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan sistem, dan dampaknya terhadap kebijakan publik. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi SIKS-NG telah berkembang menjadi instrumen penting dalam pengambilan kebijakan kesejahteraan sosial. Namun, keberhasilan implementasinya tetap sangat dipengaruhi oleh kualitas data, dukungan layanan, koordinasi antar lembaga, serta kesiapan sumber daya manusia dalam mengelola sistem secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, aplikasi SIKS-NG memiliki peran yang cukup penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Probolinggo, khususnya melalui pengelolaan data kesejahteraan sosial dan penyaluran bantuan sosial yang lebih terarah. Keberadaan aplikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendataan, tetapi juga menjadi dasar dalam proses pengambilan kebijakan sosial agar bantuan dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran. Perubahan sistem dari DTKS menjadi DTSN menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas, integrasi, dan akurasi data kesejahteraan masyarakat secara nasional.

Dalam implementasinya, aplikasi SIKS-NG melibatkan beberapa pihak yang memiliki fungsi masing-masing, seperti kepala dinas, verifikator, pengisi data, dan admin. Selain itu, penggunaan sistem desil dalam pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat membantu pemerintah dalam menentukan prioritas penerima bantuan sosial secara lebih objektif. Dibandingkan dengan sistem manual sebelumnya, aplikasi ini juga dinilai mampu mempermudah proses pengelolaan dan penelusuran data secara lebih terstruktur dan terpusat.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa penggunaan aplikasi SIKS-NG masih menghadapi beberapa kendala, terutama pada aspek teknis, kualitas layanan, dan kualitas data. Gangguan jaringan, error sistem, minimnya sosialisasi pembaruan fitur, serta belum optimalnya keberadaan operator desa menjadi hambatan dalam proses pemutakhiran data dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, masih ditemukan permasalahan inclusion error dan exclusion error yang menunjukkan bahwa data dalam sistem belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi riil masyarakat di lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi aplikasi SIKS-NG tidak hanya ditentukan oleh kualitas teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas informasi, dukungan layanan, kesiapan sumber daya manusia, serta proses pemutakhiran data yang dilakukan secara berkelanjutan.

Jika dikaitkan dengan model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean, aplikasi SIKS-NG telah memberikan manfaat dalam mendukung pengelolaan data kesejahteraan sosial dan penyaluran bantuan sosial. Akan tetapi, beberapa aspek seperti kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, serta kemampuan pengguna masih memerlukan peningkatan agar efektivitas sistem dapat berjalan secara lebih optimal dan mampu mendukung kebijakan sosial yang lebih tepat sasaran. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti menyarankan kepada Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo meningkatkan proses pemutakhiran data secara berkala, memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa, serta meningkatkan pelatihan dan sosialisasi kepada operator terkait penggunaan dan pembaruan sistem aplikasi SIKS-NG. Selain itu, diperlukan peningkatan kualitas infrastruktur jaringan dan dukungan layanan dari pihak pusat agar kendala teknis dapat

diminimalkan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji implementasi aplikasi SIKS-NG dengan pendekatan yang lebih luas, seperti mengukur tingkat efektivitas kebijakan bantuan sosial atau menganalisis kepuasan pengguna sistem di tingkat daerah maupun desa.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini sehingga penelitian dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Universitas Nurul Jadid, khususnya kepada dosen pembimbing dan seluruh pihak akademik yang telah memberikan arahan, ilmu pengetahuan, serta dukungan selama proses penyusunan penelitian ini. Selain itu, Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo yang telah memberikan izin penelitian, membantu proses pengumpulan data, serta memberikan informasi yang dibutuhkan selama penelitian berlangsung.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan, motivasi, serta semangat selama proses penelitian dan penyusunan artikel ini. Selain itu, penulis juga berterima kasih kepada seluruh informan, sahabat, serta pihak-pihak lain yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian penelitian ini. Terakhir, penulis mengapresiasi diri sendiri atas usaha, ketekunan, dan semangat dalam menyelesaikan penelitian ini hingga tahap akhir. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

DAFTAR REFERENSI

- Al Fatta, H. (2007). Analisis dan Perancangan Sistem Informasi untuk Keunggulan Bersaing Perusahaan dan Organisasi Modern. In Andi. Penerbit Andi.
<https://books.google.co.id/books?id=oHi8C1W4N7wC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>
- ALIM, N. I. (2024). *Pengukuran Kesuksesan Aplikasi Dana Berdasarkan D&M Model Dan Eucs (Studi Kasus: Mahasiswa Universitas Hasanuddin)*.
- Almahmudi, N. M. (2019). KONSEP KESEJAHTERAAN DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *KHULUQIYYA*, 1(2), 1–19.
- Andriani, Y., Suwitri, S., & Yuniningsih, T. (2023). Penerapan E-Government Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Sebagai Aplikasi Pengolah Data Kemiskinan Di Kabupaten Bengkulu Selatan. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 11(2), 129–147.
<https://doi.org/10.34010/agregasi.v11i2.11255>
- Darma, S. (2024). Pengukuran Output Ekonomi: Perspektif Islam Dan Konvensional Dalam Menilai Kesejahteraan Sosial. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3(2), 167–175.
<https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet>
- Diskominfo Ogan Ili. (2023). *Siks-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation)*. Kementrian .
- Fajar, S. Al, Syarifuddin, H., & Razak, M. R. R. (2025). STRATEGI PEMERINTAH TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA PATTONDON SALU KABUPATEN ENREKANG Haeruddin Syarifuddin Muhammad Rais Rahmat Razak. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 8(2), 847–871.
- Farhatun, D. (2024). Manfaat Sistem Informasi Manajemen Berbasis Aplikasi Siks-Ng Dalam Memudahkan Pendataan Masyarakat Penerimaan Bantuan (Studi Di Kantor Balai Desa Dahari Indah Talawi Batu Bara). *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, 1(6), 420–427.
- Fentiani, S. A., Achdiani, Y., & Nastia, G. I. P. (2025). Peran Kesejahteraan Sosial Dalam

- Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*. Haromin, & Andriyansah, D. (2022). EFEKTIVITAS PENERAPAN E-GOVERNMENT MELALUI SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL NEXT GENERATION (SIKS-NG) SEBAGAI APLIKASI PENGOLAH DATA KEMISKINAN DI DESA LAMAJANG KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG. *Jurnal JISIPOIL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung*, 6(3), 34–56.
- Jayanti, N. D., Jaisy, N. A., Puspitasari, A., Sukmananda, A., & Ramadhani, N. F. (2024). Upaya Peningkatan Kesejahteraan Dasar Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia Demi Menekan Ketimpangan Ekonomi Di Masyarakat. *Juris Humanity*, 63–77.
- Junaedi, D., Lindawati, & Alfiatun. (2021). ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENSEJAHTERAKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DESA ALASSUMUR LOR KEC. BESUK KABUPATEN PROBOLINGGO. *Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora*, 2(3), 342–346.
- Lumowa, F., Najooan, H., & Pangemanan, S. E. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar pada Masa Pandemi di Desa Tondei I Kabupaten Minahasa Selatan. *GOVERNANCE*, 1(2), 1–10.
- Mulyana, A., Maruapey, M. H., & Rahmawati, R. (2024). INNOVATIVE GOVERNANCE: STUDI PENGELOLAAN DTKS MELALUI SIKS-NG DALAM PEMENUHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN BOGOR INNOVATIVE GOVERNANCE: A STUDY ON DTKS MANAGEMENT THROUGH SIKS-NG IN FULFILLING SOCIAL WELFARE IN BOGOR. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 117–129.
- Ningrum, E. P., Sumarno, Nursyamsi, S. E., & Siregar, N. (2024). Faktor Terkait Kesenjangan Ekonomi dan Kesejahteraan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 116–126.
- Oktaviyana, A., Aritonang, M. M. B., & Sembiring, E. S. br. (2025). *Analisis Dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen*. <https://circle-archive.com/index.php/carc>
- Pratiwi, D. C., & Imsar. (2022). Analisis penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) dinas sosial pada masyarakat Kabupaten Batu Bara. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5684–5690.
- Qoiriyah, M., Primandhana, W. P., & Sishadiyati. (2024). Pengaruh Optimalisasi Program Kalimasada Dalam Mendukung Tertib Administrasi Kependudukan Pada Pembangunan Ekonomi Regional di Siwalankerto. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 494–503. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13897511>
- Rahmawati, N., & Bayangkara, I. K. (2024). Peran Green Economy dalam Meningkatkan Aspek Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Studi Literatur). *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 3(3), 289–301. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i3.2758>
- Salsabila, A. K., Afifuddin, & Rahmawati, S. D. (2025). EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL NEXT GENERATION (SIKS-NG) SEBAGAI PENGOLAH DATA KEMISKINAN DESA GROBOGAN KECAMATAN MOJOWARNO KABUPATEN JOMBANG. *Jurnal Respon Publik*, 19(7), 22–30.
- Sanimanto, O. (2024). *Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Probolinggo, 2024*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo .
- Sari, I. M., Ardian, Z., Sahputra, I., & Ilhadi, V. (2024). SISTEM INFORMASI MAGANG BERBASIS WEBSITE PADA KANTOR CABANG BPJS KETENAGAKERJAAN LHOKSEUMAWE. *SISFO : Jurnal Ilmiah Sistem Informasi*, 8(1), 110–127.
- Sastrawan, B., Samsi, A., & Seran, G. G. (2024). Pelayanan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Masyarakat. *Karimah Tauhid*, 3(1), 473–479.

-
- Sekar Arum Puspita Ramadhani, I. F. A. (2025). Efektivitas Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Sebagai Aplikasi Pengolah Data Kemiskinan Desa. *Dinamika Governance Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 14(04), 399–409. <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg>
- Suharto, E. (2015). Peran Perlindungan Sosial Dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia (Studi Kasus Program Keluarga Harapan). 22 *Sosiohumaniora*, 17(1), 22–28.
- Sutabri, T. (2012). *Analisis sistem informasi*. Penerbit Andi. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=ro5eDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Analisis+Sistem+Informasi&ots=WEnhWQ1gRg&sig=6g_zTVwb9Wh6Sxbxbqsx9qcPo7o&redir_esc=y#v=onepage&q=Analisis%20Sistem%20Informasi&f=false
- Sutiyo, & Fadhilah, H. A. (2024). *Perlindungan Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat*. CV Budi Utama. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=aKArEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Perlindungan+Sosial+dan+Pemberdayaan+Masyarakat&ots=8_sdVXdFcm&sig=vL4VC245b00keBVxHhtb6PfXXLw
- UU Nomor 11 Tahun 2009. (n.d.).
- Windari, V. D., & Rodiyah, I. (2024). Mengubah Sistem Kesejahteraan Sosial: Wawasan dari Sistem Informasi Generasi Selanjutnya (SIKS-NG). *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi Dan Masyarakat*, 1(1), 1–17. <https://doi.org/10.47134/jpem.v1i1.290>
- Yulfa, S., & Suhita, D. (2025). *Efektivitas Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SISK-NG) Berbasis E-Goverment Di Dinas Sosial Kabupaten Sragen*. 1–9.
- Yusman, Y., Putra, R. R., & Sinaga, I. (2024). *Penerapan sistem informasi untuk meningkatkan tata kelola dan pelayanan publik di era digital*. Serasi Media Teknologi. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=Y7U1EQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=Penerapan+sistem+informasi+untuk+meningkatkan+tata+kelola+dan+pelayanan+publik+di+era+digital&ots=boZ0zI0XBY&sig=cHHbnBDuQDbuuCm2dSgFUQNMGys>
-